

**ANALISIS MANAJEMEN PUBLIK
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DI KOTA PALEMBANG.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Administrasi Publik**



**DISUSUN OLEH:
HILMI RAFIANSYAH
07011382025174**

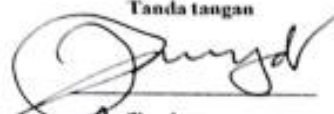
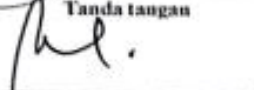
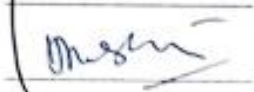
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS MANAJEMEN PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA DI KOTA PALEMBANG

Diajukan Oleh:

HILMI RAFIANSYAH
NIM. 07011382025174

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji Dan Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Pada
Tanggal 17 Mei 2024

	Pembimbing		Tanda tangan
1	Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si NIP. 198801272019031005		
	Penguji		Tanda tangan
1	Junaidi, S.IP., M.Si NIP. 197603092008021009		
2	Dian Anggraini, S.IP., M.Si NIP. 198108142023212021		

Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfiri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110199401100

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hilmi Rafiansyah

Nim : 07011382025174

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Manajemen Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Di Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 14 Mei 2024



METERAI
TEMPER
CSAKX814021374
Hilmi Rafiansyah
07011382025174

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jangan Merasa Hebat Dan Seperti Hebat, Ingatlah Siapa
Yang Pertama Kali Menghebatkan Kita”

(Hilmi Rafiansyah)

PERSEMBAHAN

Karya ini
kupersembahkan
untuk: Kedua orangtua
Keluarga
Teman-teman seperjuangan
Seluruh dosen yang telah memberikan bimbingan
dan arahan Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan Proposal Skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Di kota Palembang”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Puji syukur penulis haturkan kepada ayah saya, Musrifin Jakfar yang selalu mendoakanku, mendidikku, dan memberiku semangat yang tiada henti pada penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Orang Tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan secara moril, materil serta doa yang senantiasa mengantarkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Hoirun Nisyak, S. Pd., M.Pd selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, M. Si selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
8. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si Selaku Pembimbing Skripsi dan Sekretaris Jurusan yang telah meluangkan waktu, memberikan pikiran, gagasan, ilmu pengetahuan, saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Rafflesia Adesty pengadministrasi Pendidikan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Kampus Palembang.

10. Bapak Aris Maleisan, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Tata Bangunan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan pengambilan data dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Ibu Poppy Augustina. L, ST., MT selaku Pembina pada bidang teknik tata bangunan dan perumahan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan pengambilan data dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ibu Nyimas Dewie Hikmah Indah, ST selaku Sub Koordinator pada bidang teknik tata bangunan dan perumahan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu proses wawancara dan pengambilan data dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-temanku: Chrypson Sidabalok, M Naufal Gibran, Muhamad Dafha Mayrizkiy, M Farhan Natanegara, Muhammad Abrar Alhadi, terima kasih telah menemani dan mendukung penulisan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Palembang, Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada manajemen publik dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara di Kota Palembang ialah kurangnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang matang. Terkadang proyek pembangunan tidak didasarkan pada analisis yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan tata ruang yang tepat. Akibatnya, pembangunan bangunan mungkin tidak efisien, tidak sesuai dengan kebutuhan aktual, atau bahkan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, dan kontraktor, dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori Manajemen Publik George R. Terry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara sudah mengalami peningkatan proses lebih baik dalam bekerja, Seperti pada tahap perencanaan sudah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal serta aspek tata ruang yang tepat, pada tahap pengorganisasian sudah menentukan struktur organisasi proyek, alokasi tugas, dan pembentukan tim kerja yang efektif, pada tahap pelaksanaan proyek sudah melibatkan eksekusi rencana yang telah dibuat, termasuk pembangunan bangunan baru, perluasan, atau rehabilitasi, untuk tahap pengawasan harus dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Manajemen Publik, Penyelenggaraan, Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Pembimbing

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The identified issues in public management regarding the implementation of state building construction in Palembang City include the lack of thorough planning, organization, execution, and supervision. Sometimes, construction projects are not based on in-depth analyses of community needs and appropriate spatial planning. Consequently, building construction may be inefficient, not meeting current needs, or even unsustainable in the long run. The lack of coordination among various stakeholders, such as local government, relevant agencies, and contractors, can lead to difficulties in project implementation. This research is of a descriptive qualitative nature, utilizing George R. Terry's Public Management theory. The research findings indicate that the implementation of State Building Construction has undergone an improvement process, such as in the planning stage, where considerations are made for local community needs and appropriate spatial planning. In the organizational stage, the project's organizational structure, task allocation, and effective team formation have been determined. During the project execution phase, execution of the established plans, including construction of new buildings, expansions, or rehabilitations, has been involved. In the supervision phase, meticulous oversight is necessary to ensure that construction proceeds in accordance with established standards and meets the needs of the local community.

Keywords: *Public Management, Implementation, State Building Construction*

Advisor

Januar Eko Aryansah, S.IP., SH., M.Si
NIP. 198801272019031005



Acknowledged by,
Head of Public Administration Department



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Manajemen Publik	9
2.1.1.1 Pengertian Manajemen Publik	9
2.1.1.2 Fungsi Manajemen Publik	10
2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Manajemen Publik	12
2.1.2 Bangunan Gedung Negara	14
2.1.2.1 Pengertian Bangunan Gedung negara	14
2.1.2.2 Klasifikasi Bangunan Gedung Negara	15
2.1.2.3 Fungsi Bangunan Gedung Negara	17
2.1.2.4 Tujuan Bangunan Gedung Negara	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29

3.1	Jenis Penelitian	29
3.2	Definisi Konsep	29
3.3	Fokus Penelitian.....	30
3.4	Sumber Data	31
3.5	Informan penelitian.....	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.7	Analisis Data.....	32
3.8	Jadwal Penelitian	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		34
4.1	Gambaran Tempat Penelitian	34
4.1.1	Sejarah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang	34
4.1.2	Struktur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	35
4.1.3	Tugas Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	35
4.1.4	Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	40
4.2	Informan Penelitian.....	40
4.3	Hasil Penelitian.....	41
4.3.1	Perencanaan Teknis	42
4.3.2	Pengorganisasian	59
4.3.3	Tahap Pelaksanaan	64
4.3.4	Tahap Pengawasan	75
BAB V PENUTUP		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka berpikir	27
Gambar 4.1 Tampak Depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang	33
Gambar 4.2 Struktur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	34
Gambar 4.3 Wawancara Terkait Perencanaan	57
Gambar 4.4 Wawancara Mengenai Tahap Pengorganisasian	61
Gambar 4.5 Wawancara Mengenai Tahap Pengawasan.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Informan.....	96
Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....	97
Lampiran 3 SK Pembimbing Skripsi	100
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian.....	101
Lampiran 5 Surat Balasan Izin Penelitian	102
Lampiran 6 Kartu Bimbingan Seminar Proposal	103
Lampiran 7 Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	105
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi	106
Lampiran 9 Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif	107
Lampiran 10 Hasil Turnitin.....	108
Lampiran 11 Surat Pengecekan Similiarity.....	109
Lampiran 12 KRS Terakhir	110
Lampiran 13 Forlap Dikti.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian manajemen publik menurut para ahli yang akan disebutkan tergantung latar belakang pendidikan, pengalaman, atau perspektif yang dianut oleh para ahli tersebut. Menurut Nor Ghofur (2014) Mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen public juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Manajemen publik umumnya mengarah pada masalah-masalah kebijakan yang nyata dan diaplikasikan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pimpinan organisasi publik menghadapi tantangan dan persoalan yang lebih kompleks dan paradoksal daripada pimpinan organisasi swasta, yaitu mengembangkan organisasi secara efisien, responsif, transparan dan akuntabel. Selain itu, organisasi organisasi publik pun memiliki memiliki nuansa yang sarat dgn aspek politis dan memiliki stakeholders yang bersifat heterogen, sehingga seorang pimpinan organisasinya harus memiliki kemampuan dan kepekaan politik sekaligus cakap secara manajerial. Manajemen publik merupakan cabang keilmuan dari administrasi publik yang membahas mengenai restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, manajemen sumberdaya dan evaluasi program. Konsep manajemen publik sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungan yang ada sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dalam suatu

organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut.

Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat. Dalam semua organisasi, manajemen dibutuhkan untuk mengarahkan orang-orang didalam organisasi untuk bekerjasama demi mencapai tujuan organisasi. Karena itu, manajemen dibutuhkan dalam semua organisasi demi mencapai tujuan yang hendak dicapai. Ilmu manajemen digunakan untuk menggerakkan orang-orang didalam organisasi supaya bisa berjalan demi kepuasan orang-orang yang dilayaninya. Manajemen dibutuhkan dimana saja ketika terdapat orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen adalah sesuatu yang abstrak tetapi dapat dilihat hasilnya dari hasil implementasinya didalam organisasi. Dalam prakteknya, manajemen dibutuhkan dimana saja ketika ada orang-orang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen adalah suatu siklus kegiatan yang disusun secara sistematis dan terkoordinir melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Pengertian manajemen publik sangatlah penting bagi seseorang yang sedang mengambil disiplin Ilmu Administrasi Negara atau disiplin ilmu Administrasi Publik. Alasannya karena dengan mengetahui pengertian atau defensini Manajemen Publik tersebutlah sejatinya kita akan mengetahui kedudukan Manajemen Publik di dalam suatu Negara. Adapun definisi atau pengertian manajem publik sebenarnya lebih menekankan pada bentuk implementasi yang berupa penerapan model, teori, metode, teknik, serta cara untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif.

Dari penjelasan para ahli yang telah mengemukakan pengertian manajemen publik di atas dapat disimpulkan bahwasanya Manajemen Publik ialah studi interdisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti, *planning, organizing, actuating, dan controlling* dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan publik

Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan di wilayahnya. Pembangunan bangunan yang berkualitas dan terencana menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga tata ruang dan lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi, kebutuhan akan sarana dan prasarana di Kota Palembang meningkat secara signifikan.

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan memerlukan pembangunan bangunan yang memadai, seperti perumahan, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Pembangunan bangunan yang baik dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Palembang. Dengan tersedianya fasilitas umum yang memadai, seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi, masyarakat akan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap layanan dan sarana yang dibutuhkan. Penyelenggaraan pembangunan bangunan yang terencana juga penting untuk menjaga tata ruang dan lingkungan Kota Palembang. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pemerintah dapat mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan, seperti polusi, kerusakan ekosistem, dan peningkatan risiko bencana alam. Palembang memiliki

potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pariwisata, perdagangan, dan industri. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diperlukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, seperti pelabuhan, bandara, pusat bisnis, dan kawasan industri.

Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Bangunan sederhana adalah Bangunan Gedung Negara dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana. Bangunan Tidak Sederhana adalah Bangunan Gedung Negara dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan bangunan Gedung negara adalah kegiatan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran pada BGN. Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara yang efektif dan efisien akan mendukung pengembangan sektor ekonomi tersebut. Penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara pada Pemerintah Kota Palembang, seperti Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai standar dan prosedur pembangunan bangunan gedung negara. Pembangunan bangunan gedung negara di Kota Palembang adalah bagian penting dari upaya pemerintah untuk menyediakan infrastruktur publik yang mendukung berbagai layanan dan kegiatan pemerintahan. Palembang, sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki

banyak bangunan gedung negara yang memainkan peran kunci dalam administrasi dan pelayanan publik di tingkat lokal dan regional. Pembangunan bangunan gedung negara di Kota Palembang bertujuan untuk menyediakan tempat yang sesuai untuk berbagai departemen dan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini meliputi kantor-kantor pemerintah, pusat pelayanan publik, lembaga legislatif, dan tempat-tempat penting lainnya. Bangunan gedung negara di Kota Palembang memiliki berbagai fungsi, seperti tempat pertemuan untuk rapat pemerintah, pusat administrasi untuk pengelolaan dan pengawasan kegiatan pemerintah, tempat penyelenggaraan program- program pelayanan publik, dan pusat pengambilan keputusan politik.

Dalam merencanakan pembangunan bangunan gedung negara, faktor keberlanjutan sangat diperhatikan. Ini termasuk penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, perencanaan tata ruang yang efisien, dan penggunaan teknologi hijau untuk mengurangi dampak lingkungan. Pembangunan bangunan gedung negara juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Pendapat dan masukan dari masyarakat lokal sering kali dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, desain, dan fungsi bangunan tersebut. Setelah selesai dibangun, bangunan gedung negara harus dikelola dan dipelihara dengan baik agar tetap berfungsi dengan optimal. Ini melibatkan perawatan rutin, perbaikan jika diperlukan, dan pengelolaan fasilitas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna bangunan. Pembangunan bangunan gedung negara juga berkontribusi pada perkembangan kota secara keseluruhan. Mereka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi di sekitarnya, dan memberikan identitas visual yang kuat bagi kota.

Bangunan gedung negara memainkan peran vital dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Mereka menjadi tempat di mana warga bisa mendapatkan layanan administratif, perizinan, pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi. Secara keseluruhan, pembangunan bangunan gedung negara di Kota Palembang mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur publik, mendukung pelayanan publik yang berkualitas, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota secara berkelanjutan.

Permasalahan yang dapat diidentifikasi pada manajemen publik dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara di Kota Palembang ialah kurangnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang matang. Terkadang proyek pembangunan tidak didasarkan pada analisis yang mendalam tentang kebutuhan masyarakat dan tata ruang yang tepat. Akibatnya, pembangunan bangunan mungkin tidak efisien, tidak sesuai dengan kebutuhan aktual, atau bahkan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, kurangnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, dan kontraktor, dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan memperhatikan latar belakang ini, Pemerintah Kota Palembang perlu melakukan penyelenggaraan pembangunan bangunan yang terarah, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan yang nyaman, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah ini adalah Bagaimanakah Manajemen Publik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kota Palembang?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian adalah agar bisa mengetahui bagaimana Manajemen Publik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan dan memperdalam ilmu Manajemen penulis pada analisis Manajemen Publik perusahaan dalam menyikapi penyelenggaraan bangunan gedung di kota Palembang.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan manajemen publik dari suatu organisasi atau lembaga pemerintah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dalam mengobservasi dan menganalisis serta dapat membantu untuk memberikan informasi mengenai manajemen publik yang dijalankan suatu perusahaan dalam menghadapi suatu masalah penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan dan referensi bagi para peneliti yang melakukan penelitian yang sama atau berkaitan mengenai manajemen publik untuk waktu yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan menambah wawasan atas manajemen publik lembaga pemerintah ketika sedang berhadapan dengan situasi penyelenggaraan seperti pembangunan bangunan gedung negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dan Eksekutif Burhanudin Gesi, M., Laan, R., & Lamaya Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi, F. (2019). Manajemen Dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen*, 3(2).
- Firdausijah, R. T., Alaslan, A., Mustanir, A., Sunariyanto, A., Fauzan, R., Sagena, U., Putra, A., & Amane, O. (2023). Manajemen Sektor Publik. *PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI*. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Hasibuan. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Drs H Malayu S.P Hasibuan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2).
- Jarsan, J., & Fridiyanto, F. (2023). Manajemen Perencanaan Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Al-Miskawaih: Journal of Science Education*, 2(1). <https://doi.org/10.56436/mijose.v2i1.217>
- Roziana, B. H. I., Murtiadi, S., & Akmaludin. (2015). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Negara Di Kota Mataram. *Jurnal Teknisia*, XX(1).
- Safroni, L. (2019). Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia. *Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran*.
- Satibi, I. (2012). Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik Dan Empirik. *Unpas Press*.
- Sellang, K., & Darman, M. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Kepemimpinan Di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 14(13).
- Sustianingsih, I. M., Yati, R. M., & Iskandar, Y. (2019). Peran Sultan Mahmud Badaruddin I Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kota Palembang (1724-1758). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 19(1). <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3399>
- Ubit, M., Nurhasanah, N., & Milka, M. (2022). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik

Dalam Menghadapi Era Revolusi Digital Di Kantor Bapas Kelas
II Sampit. *Pencerah Publik*, 9(2). <https://doi.org/10.33084/pencerah.v9i2.3807>

Wardhani, C. H., Sumartono, S., & Makmur, M. (2015). Manajemen Penyelenggaraan Program Pelatihan Masyarakat (Studi di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Malang). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(01). <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.01.3>

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. *JDIH PUPR*.

Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. *JDIH BPK RI*.

Walikota Palembang. (2018). Peraturan Walikota Palembang Nomor 5D Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang. *JDIH BPPK RI*.